

BAB III

POSISI MNC DALAM PERDEBATAN

ETIKA LINGKUNGAN

Dalam konstelasi politik global kontemporer, isu lingkungan merupakan salah satu isu yang menyita banyak perhatian. Isu lingkungan sebenarnya bukanlah barang baru, dinamikanya sudah dimulai sejak puluhan tahun lalu. Seperti yang terjadi pada tahun 1952 di London, selama 5 hari terjadi perubahan temperatur dan pembentukan kabut yang menyebabkan kematian 3.500-4.000 penduduk. Peristiwa ini disebut dengan London smog. Peningkatan isu lingkungan semakin memanas pada dekade 1970an di mana saat itu terjadi bencana-bencana lingkungan seperti kasus populer tercemarnya Minamata di Jepang akibat limbah industri. Gerakan penyelamatan lingkungan pun semakin meluas dengan dibawa serta oleh Kaum Hippies yang sedang menggejala saat itu. Pada dekade ini pula diinisiasi dua hari bersejarah yang masih diperingati hingga sekarang, yaitu Hari Bumi dan Hari Lingkungan Hidup.

Permasalahan lingkungan adalah isu yang strategis menyangkut nilai lingkungan itu sendiri yang berdampak pada kehidupan manusia. Permasalahan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari persoalan ekonomi dan politik yang tentu tidak bisa lepas dari manusia. Membahas masalah lingkungan artinya membawa kepentingan ekonomi politik dari setiap pihak. Inilah yang menyebabkan sulitnya

menemukan titik temu dalam penyelesaiannya di dunia internasional yang pada akhirnya menjadikan lingkungan ini menjadi permasalahan global.

Berbagai macam perilaku manusia merupakan bentuk praksis dari kepentingannya. Kepentingan ekonomi seolah menghalalkan perlakuan yang seenaknya terhadap lingkungan. Hal inilah yang turut berpartisipasi dalam laju kerusakan lingkungan. Tak bisa disangkal, perilaku manusia adalah penyebab dari berbagai kasus kerusakan lingkungan yang terjadi, baik pada lingkup global maupun nasional.

Kasus pencemaran dan kerusakan di berbagai belahan bumi bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, hanya mengutamakan kepentingannya saja tanpa peduli pada lingkungan. Di Indonesia saja, bertebaran contoh kasus perilaku pengrusakan manusia terhadap lingkungan. Misalnya saja industri kelapa sawit yang menggunduli hutan tropis dan menggantinya dengan tanaman sawit, atau bisnis illegal logging yang menghabisi hutan-hutan di Kalimantan, belum lagi kasus pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang semacam Freeport di Papua dan berbagai tempat lainnya.

Persoalan lingkungan yang timbul seperti itu tidak lain disebabkan oleh perilaku perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Kasus seperti ini tidak hanya menyangkut orang per orang, namun juga melibatkan birokrasi pemerintah yang telah memberikan izin operasi. Lebih luas dari itu, kasus tentang perilaku tidak bertanggung jawabnya perusahaan juga melibatkan perjanjian-perjanjian internasional untuk mengatur dan mengelola kelicikan manusia dalam

mengejar keuntungan meskipun hal tersebut merugikan orang lain dan lingkungan. Seperti misalnya skema REDD tentang jual beli karbon yang sepintas terlibat pro lingkungan namun bila dibedah lebih lanjut akan terlihat bahwa skema tersebut hanyalah media untuk tetap melakukan eksploitasi bumi tanpa harus mendapat citra buruk.

Menurut Arne Naess, krisis lingkungan dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Yang dibutuhkan adalah, sebuah pola hidup atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang per orang, tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Artinya, dibutuhkan etika lingkungan hidup yang menuntun manusia untuk berinteraksi secara baru dalam alam semesta. Dengan ini mau dikatakan bahwa krisis lingkungan global yang kita alami dewasa ini sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia mengenai dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Pada gilirannya, kekeliruan cara pandang ini melahirkan perilaku yang keliru terhadap alam.⁴³

Manusia menempatkan dirinya sebagai poros alam semesta. Menganggap bahwa manusia adalah pusat dari segala alam semesta, sebagai makhluk yang berkuasa penuh atas yang ada di bumi. Hal inilah yang menjadi cikal bakal perilaku merusak alam, menjadi awal dari berbagai bencana lingkungan hidup yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan pembenahan perilaku manusia yang dimulai dari

⁴³Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm xiv

pembenahan cara pandang manusia terhadap lingkungan, baik itu alam di sekitarnya maupun sesama manusia dalam seluruh ekosistem.

Etika lingkungan hidup harus dipahami sebagai refleksi kritis tentang apa yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi pilihan-pilihan moral yang terkait dengan isu lingkungan hidup. Termasuk, apa yang harus diputuskan manusia dalam membuat pilihan moral dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada lingkungan hidup. Juga, apa yang harus diputuskan pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan politiknya yang berdampak pada lingkungan hidup. Ini berarti, etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam. Etika lingkungan hidup juga berbicara mengenai relasi di antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya, berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung terhadap alam.⁴⁴

Terdapat dua gagasan besar yang bertolak belakang dalam perdebatan mengenai etika lingkungan. Yang pertama adalah Ekologi Dangkal, atau biasa disebut Shallow Ecology (SE), sementara itu di sisi berseberangan adalah Ekologi Dalam atau biasa disebut Deep Ecology (DE).

⁴⁴Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm 27.

A. Shallow Ecology (Ekologi Dangkal)

Etika SE merupakan pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan fungsi lingkungan sebagai sarana penyelenggaraan kepentingan manusia dan bersifat antroposentris. Dalam hal ini, alam hanya dipandang sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Etika ekologi dangkal biasa diterapkan pada filsafat rasionalisme dan humanisme serta ilmu pengetahuan mekanistik. Pandangan ini berisi pemikiran bahwa segala kebijakan yang diambil mengenai lingkungan hidup harus dinilai berdasarkan manusia dan kepentingannya. Jadi, menempatkan manusia sebagai pusat pemikiran. Segala kebijakan terhadap alam harus diarahkan untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia.

Sebagai sebuah etika lingkungan yang bersifat antroposentrisme, seperti yang dijelaskan Sonny Keraf, bahwa antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Oleh karena itu alam pun dilihat hanya sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat pemenuhan bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri.⁴⁵

⁴⁵Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm 33.

Pandangan moral lingkungan yang antroposentris disebut juga sebagai *human centered ethics* karena mengabaikan kedudukan dan moral lingkungan hidup yang hanya terpusat pada manusia. Maka menjadi hal yang wajar apabila selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, alam dilihat sebagai alat bagi pencapaian tujuan manusia. Manusia dianggap sebagai pihak yang mempunyai nilai tertinggi, berada di atas semua makhluk lain karena dianggap sebagai makhluk yang paling rasional, sehingga mempunyai hak untuk mengeksploitasi alam demi kesejahteraan manusia.

Pandangan yang menempatkan manusia sebagai subyek sementara alam hanyalah obyek semata menimbulkan efek buruk pada alam. Dengan menempatkan alam sebagai obyek yang bisa dieksploitasi, manusia menganggap alam sebagai pihak yang harus ditundukkan dan dikalahkan. Posisi timpang dan tidak adil ini merupakan efek destruktif luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Banjir, tanah longsor, erosi tanah, misalnya, merupakan konsekuensi tak terelakkan dari kesalahan filosofis manusia dalam memperlakukan alam ini. Fritjof Capra menyebut tendensi ini sebagai *shallow ecology* (ekologi dangkal). Perspektif keliru ini menyeret manusia sebagai subjek dominan dan memegang kuasa penuh dan tunggal untuk menaklukkan serta mengeksploitasi alam.⁴⁶

Sementara segala tuntutan mengenai manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan, tidak pada tempatnya. Kalaupun tuntutan itu masuk akal, itu hanya dalam pengertian tidak

⁴⁶ Mustofa Muchdhor, "Menuju Deep Ecology", diakses dari http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6138&coid=1&caid=56&gid=2

langsung, yaitu sebagai pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap sesama. Maksudnya, kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan-kalaupun itu ada- itu semata-mata demi memenuhi kepentingan sesama manusia. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap alam hanya merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia. Bukan merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam itu sendiri.⁴⁷

Selain bersifat antroposentris, etika ini sangat instrumentalistik, dalam pengertian pola hubungan manusia dan alam dilihat hanya sebagai relasi instrumental. Alam dinilai sebagai alat bagi kepentingan manusia. Kalaupun manusia mempunyai kepedulian terhadap alam, itu semata-mata dilakukan demi menjamin kebutuhan hidup manusia.⁴⁸

Untuk menjelaskan kondisi lingkungan yang terjadi dewasa ini, sesungguhnya telah dijelaskan oleh Arne Naess bahwa nilai dari etika yang mengenyampingkan aspek lingkungan demi kepentingan manusia atau dalam hal ini kita menyebutnya sebagai kepentingan ekonomi adalah etika yang dangkal (*shallow*) di mana etika *shallow* ini menjadikan manusia sebagai pusat moral dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi,⁴⁹ sehingga manusia dengan seluruh kebutuhannya menjadi prioritas utama dan harus dikejar dengan menghiraukan keberadaan makhluk lain di muka bumi. Analogi singkat untuk mengetahui SE ini adalah

⁴⁷ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm 34.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ William Chang, *Moral Lingkungan Hidup : Paradigma Baru* (Yogyakarta, Kanisius), hlm 77.

berlangsungnya PT NNT di wilayah Indonesia mendapatkan izin beroperasi mengeksploitasi emas dan tembaga yang memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik modal dan sebagian manusia lainnya, namun pada hakikatnya akan menguras sumber daya alam yang ada dengan meninggalkan kerusakan-kerusakan lingkungan akibat proses eksploitasi seperti hilangnya habitat bermacam flora dan fauna yang sebelumnya bisa hidup, namun hidupnya terpaksa terganggu bahkan musnah karena rusaknya ekosistem. Inilah salah satu contoh SE yang sedang terjadi saat ini.

Secara garis besar, SE menekankan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- Manusia terpisah dari alam,
- Mengutamakan hak-hak manusia atas alam tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia.
- Mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya
- Kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia
- Norma utama adalah untung rugi.
- Mengutamakan rencana jangka pendek.
- Pemecahan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk khususnya dinegara miskin.
- Menerima secara positif pertumbuhan ekonomi.⁵⁰

⁵⁰Etika ekologi dangkal dan ekologi dalam. Diunduh dari http://acehpedia.org/Etika_Ekologi_Dangkal_dan_Dalam

Oleh karena sikapnya yang cenderung egoistic dan instrumentalistik terhadap alam, SE sering dituduh sebagai biang keladi kerusakan lingkungan. Etika inilah yang menyebabkan manusia merasa tidak bersalah bila mengeksploitasi alam demi kepentingannya, sementara kepedulian hanya muncul selama itu menyangkut kepentingannya, itupun seringkali hanya bersifat jangka pendek.

B. Deep Ecology (Ekologi Dalam)

Berbeda dengan SE yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala kehidupan di alam semesta atau bersifat antroposentris di mana etika hanya berlaku untuk komunitas manusia, maka DE memperluas konsep etika pada seluruh komunitas ekologis baik yang hidup maupun tidak. Menurut DE, bukan hanya manusia yang mempunyai nilai, melainkan juga makhluk-makhluk lain yang ada di jagad raya. DE tidak memisahkan manusia atau apapun dari lingkungan alamiah. Benar-benar melihat dunia sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah, tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain secara fundamental. Ekologi dalam mengakui nilai intrinsik semua makhluk hidup dan memandang manusia tak lebih dari satu untaian dalam jaringan kehidupan. Dipopulerkan oleh Arne Naess pada tahun 1973, DE kemudian menjadi roh dalam gerakan penyelamatan lingkungan hingga sekarang.

DE menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Manusia bukanlah pusat dari dunia moral. DE justru memusatkan perhatian pada semua spesies, termasuk spesies bukan

manusia. singkatnya, kepada biosphere seluruhnya. Demikian pula DE tidak hanya memusatkan perhatian pada kepentingan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Maka prinsip moral yang dikembangkan DE menyangkut kepentingan seluruh komunitas ekologis.⁵¹ DE meyakini bahwa manusia mempunyai martabat yang sama dengan makhluk lainnya, bahwa keberadaan manusia tidak berbeda dengan yang lain yaitu merupakan keseluruhan yang terkait. Ini menyangkut hak setiap makhluk baik itu hayati maupun non hayati untuk tetap bertahan adalah sebuah hak universal.

DE berpendapat bahwa alam adalah sebuah keseimbangan di mana di dalamnya terdapat hubungan yang kompleks antar makhluk, keberadaan suatu organisme tergantung pada organisme yang lain. Gangguan manusia dengan menghancurkan alam menimbulkan ancaman bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk semua organisme yang merupakan tatanan alam.⁵²

Prinsip yang dianut DE adalah pengakuan terhadap semua organisme dan makhluk hidup, ini mengacu pada pengakuan segala sesuatu yang ada di bumi harus dihargai dan karena pada dirinya mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Dan prinsip yang kedua adalah melihat bahwa manusia bukan sebagai penguasa alam tetapi statusnya sama dengan makhluk hidup lainnya sehingga dominasi manusia terhadap alam digantikan dengan sikap saling ketergantungan. Dan yang ketiga dari prinsip DE adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dalam suatu hubungan simbiosis, yang berarti bahwa hidup bersama saling

⁵¹Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002), Hlm 76.

⁵²Diterjemahkan dari Deep Ecology. Diunduh dari Wikipedia.org pada 18 des 2012

menguntungkan. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan manusia haruslah menghargai sumber daya alam bagi kebutuhan spesies lain.

DE juga berdasar pada cakrawala pandangan menyeluruh. Dengan melihat saling ketergantungan dan keterkaitan antar organisme dalam lingkungan hidup.⁵³

Ada 8 prinsip DE yang dilihat sebagai pandangan yang rata-rata dianut oleh pendukung DE:

1. Kesejahteraan dan keadaan baik dari kehidupan manusiawi maupun kehidupan bukan manusiawi di bumi, mempunyai nilai intrinsik. Nilai-nilai ini tak tergantung dari bermanfaat tidaknya dunia bukan manusiawi untuk tujuan manusia.

2. Kekayaan dan keanekaan bentuk-bentuk hidup, menyumbangkan kepada terwujudnya nilai-nilai dan merupakan nilai-nilai sendiri.

3. Manusia tidak berhak mengurangi kekayaan dan keanekaan ini, kecuali untuk memenuhi kebutuhan vitalnya.

4. Keadaan baik dari kehidupan dan kebudayaan manusia dapat dicocokkan dengan dikurangnya secara substansia jumlah penduduk. Keadaan baik kehidupan bukan-manusiawi memerlukan dikurangnya jumlah penduduk itu.

5. Campur tangan manusia dengan dunia bukan manusia kini terlalu besar, dan situasi memburuk dengan pesat.

6. Karena itu kebijakan umum harus berubah. Kebijakan itu menyangkut struktur-struktur dasar di bidang ekonomi, teknologi, dan ideologi. Keadaan yang timbul sebagaimana hasilnya akan berbeda secara mendalam dengan struktur-struktur sekarang.

⁵³William Chang, *Moral Lingkungan Hidup : Deep Ecology*(Yogyakarta, Kanisius)Hal 78.

7. perubahan ideologis adalah terutama menghargai kualitas kehidupan (artinya, manusia dapat tinggal dalam situasi-situasi yang bernilai inheren), dan bukan berpegang pada standar kehidupan yang semakin tinggi. Akan timbul kesadaran mendalam akan perbedaan antara big (kuantitas) dan great (kualitas).

8. mereka yang menyetujui butir-butir sebelumnya berkewajiban secara langsung dan tidak langsung untuk mengusahakan mengadakan perubahan-perubahan yang perlu.⁵⁴

C. Posisi MNC dalam Perdebatan Etika Lingkungan

Pemanasan global yang sekarang melanda bumi diyakini sebagai hasil dari manusia yang terlalu eksploitatif terhadap alam. Bisa kita saksikan, eksploitasi hutan alam besar-besaran membuat paru-paru dunia semakin sempit, industrialisasi juga semakin menyesak bumi dengan polusinya. Masih ditambah dengan pemborosan terhadap bahan bakar fosil yang meningkat setiap waktu. Begitu juga dengan muncul dan berkembangnya perusahaan besar yang tidak ramah lingkungan dengan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya ikut andil dalam usaha kerusakan lingkungan dewasa ini.

Di awal periode sembilan puluhan, masalah lingkungan semakin menyita perhatian dunia internasional. Kelangsungan bumi, mengingat keadaan lingkungan yang semakin memburuk, menjadi pertanyaan besar bagi banyak pihak. Kondisi bumi yang tidak lagi seimbang membawa banyak permasalahan bagi kelangsungan hidup manusia sebagai penghuninya.

⁵⁴Pengantar etika bisnis

Permasalahan ini akhirnya dibawa ke PBB untuk dibahas lebih serius. KTT Bumi atau yang juga dikenal dengan nama Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), KTT Rio dan Konferensi Rio, merupakan salah satu konferensi utama PBB yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil dari tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 1992.⁵⁵ Persoalan lingkungan kemudian harus menjadi agenda politik internasional yang mengharuskan setiap negara untuk melaksanakan komitmen dalam penyelesaian persoalan lingkungan hidup. Dalam hal ini negara maju dan perusahaan multinasional menjadi sorotan utama terkait dengan kepentingan ekonomi yang ada di balik terjadinya kerusakan lingkungan.

Negara maju dengan tingginya tingkat industri, serta MNC yang beroperasi di banyak negara berkembang, kerap melakukan eksploitasi sumber daya alam dan akhirnya merugikan negara tuan rumahnya. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa MNC yang didukung oleh negara pelindungnya dituding sebagai dalang dari kerusakan lingkungan yang terjadi.

Berlangsungnya KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro tidak serta merta membawa membawa bumi pada keadaan lebih baik. Hal ini disebabkan, karena selama berlangsungnya pertemuan tentang perbaikan kualitas lingkungan, SE selalu tercermin dalam setiap kebijakan yang ada. Salah satunya adalah tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Tentu saja ini adalah kelanjutan dari sistem ekonomi pembangunan, namun dalam kemasan yang lebih pro lingkungan.

Seperti yang terdapat dalam dokumen Deklarasi Rio de Janeiro, tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (The Rio de Janeiro Declaration on

⁵⁵KTT Bumi, diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/KTT_Bumi

Environment and Development) juga dikenal dengan “Earth Chapter” terdiri atas 27 prinsip yang memacu dan memprakarsai kerja sama internasional, perlunya pembangunan dilanjutkan dengan prinsip perlindungan lingkungan, dan perlu adanya analisis mengenai dampak lingkungan. Deklarasi ini juga mengakui pentingnya peran serta masyarakat yang tidak hanya dikonsultasi mengenai rencana pembangunan, tetapi juga ikut serta dalam pengambilan keputusan, serta aktif dalam proses pelaksanaan dan ikut menikmati hasil pembangunan itu. Berikut ini adalah Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pilihan dari Deklarasi Rio (UNCED,1992 dalam Mitchel Bruce,dkk,2007) :

Prinsip 1 : Manusia menjadi pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan. Mereka hidup secara sehat dan produktif, selaras dengan alam.

Prinsip 2 : Negara mempunyai, dalam hubungannya dengan the Charter of the United Nations dan prinsip hukum internasional, hak penguasa untuk mengeksploitasi sumberdaya mereka yang sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka.

Prinsip 3 : Hak untuk melakukan pembangunan harus diisi guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan yang sama dari generasi sekarang dan yang akan datang.

Prinsip 4 : Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan seharusnya menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap sebagai bagian terpisah dari proses tersebut.

Prinsip 5 : Semua negara dan masyarakat harus bekerja sama memerangi kemiskinan yang merupakan hambatan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Prinsip 8 : Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, negara harus menurunkan atau mengurangi pola konsumsi dan produksi, serta mempromosikan kebijakan demografi yang sesuai.

Prinsip 9 : Negara harus memperkuat kapasitas yang dimiliki untuk pembangunan berlanjut melalui peningkatan pemahaman secara keilmuan dengan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan meningkatkan pembangunan, adaptasi, alih teknologi, termasuk teknologi baru dan inovasi teknologi.

Prinsip 10 : Penanganan terbaik isu-isu lingkungan adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat yang tanggap terhadap lingkungan dari berbagai tingkatan. Di tingkat nasional, masing-masing individu harus mempunyai akses terhadap informasi tentang lingkungan, termasuk informasi tentang material dan kegiatan berbahaya dalam lingkungan masyarakat, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk tanggap dan partisipasi melalui pembuatan informasi yang dapat diketahui secara luas.

Prinsip 15 : Dalam rangka mempertahankan lingkungan, pendekatan pencegahan harus diterapkan secara menyeluruh oleh negara sesuai dengan kemampuannya. Apabila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan penundaan pengukuran biaya untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan.

Prinsip 17 : Penilaian dampak lingkungan sebagai instrument nasional harus dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang mungkin mempunyai

dampak langsung terhadap lingkungan yang memerlukan keputusan di tingkat nasional.

Prinsip 20 : Wanita mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan. Partisipasi penuh mereka perlu untuk mencapai pembangunan berlanjut.

Prinsip 22 : Penduduk asli dan setempat mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan karena pemahaman dan pengetahuan tradisional mereka. Negara harus mengenal dan mendorong sepenuhnya identitas, budaya dan keinginan mereka serta menguatkan partisipasi mereka secara efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.⁵⁶

Banyak ahli lingkungan hidup mulai menyadari bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan adalah sebuah kegagalan di sisi para pejuang lingkungan hidup. Bagi mereka, kesepakatan politik yang dicapai pada KTT Bumi tahun 1992 adalah sebuah kemunduran atau kegagalan dalam negosiasi dari pihak pembela lingkungan hidup. Dengan diterimanya paradigma tersebut, yang menang adalah para ekonom dan pembela developmentalisme.⁵⁷ Sebagaimana yang disampaikan oleh Wolfgang Sach, semua delegasi berkumpul untuk mengakui adanya krisis lingkungan hidup, tetapi justru berakhir dengan menegaskan sakralnya pembangunan.⁵⁸

⁵⁶ Troy Makatita, "KTT Bumi Rio de Janeiro", diunduh dari <http://ipsalundana2011.blogspot.com/2011/11/ktt-bumi-rio-de-jeneiro.html> pada tanggal 8 Januari 2013.

⁵⁷ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm.183.

⁵⁸ Wolfgang Sachs, "Global Ecology and The Shadow of Development" dalam *George Sessions* (ed), *op.cit.*, hlm.428.

Sebagai sebuah agenda politik, paradigma ini merupakan hasil kompromi politik dan mendapat ambutan hangat dari berbagai pihak. Akan tetapi, di dalam keberhasilannya sebagai sebuah kompromi, para pejuang lingkungan hidup tidak sadar bahwa dengan menerima paradigma tersebut, kita semua kembali menegaskan bahwa yang utama adalah pembangunan ekonomi. Hasilnya, setelah sekian tahun berselang tetap saja pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang diutamakan, sedangkan aspek social budaya dan lingkungan hidup ditinggalkan dan diabaikan begitu saja. Karena watak developmentalisme tidak kita tinggalkan sama sekali, malah justru diafirmasi dengan paradigm pembangunan berkelanjutan, yang dikonversi dan yang diberlanjutkan adalah pembangunan itu sendiri dan bukan alam atau ekologi.⁵⁹

Memaknai beradabnya suatu Negara melalui kemajuan ekonomi, dan menggunakan PDB sebagai tolak ukur kemajuan ekonomi, membuat negara-negara berkembang menggunakan berbagai cara untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya. Negara-negara berkembang sibuk melakukan berbagai hal dalam rangka menaikkan tingkat Pendapatan Domestic Brutonya. Salah satunya tentu dengan cara mengolah (eksploitasi) sumber daya alam yang dimilikinya, karena pada umumnya, Negara berkembang adalah Negara yang kaya akan sumber-sumber alam.

Seringkali Negara-negara berkembang yang umumnya merupakan negara paska kolonial kekurangan modal, baik itu modal uang, teknologi, maupun sumber daya manusia. Untuk bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki, Negara berkembang memerlukan uluran tangan para investor. Kebanyakan investor berskala

⁵⁹ *ibid.*, hlm.434.

besar adalah MNC yang berinduk di Negara-negara maju. Karena merekalah yang kuat dalam hal kemampuan politis serta ekonomis.

Dengan alasan seperti ini, MNC bisa leluasa mengeruk kekayaan alam Negara-negara berkembang yang mempunyai mimpi mengejar ketertinggalannya dengan Negara maju. Konsekuensinya, semua aspek non ekonomi, termasuk lingkungan hidup ditempatkan di bawah kepentingan ekonomi.

Sementara itu, berbagai konferensi internasional yang membahas permasalahan lingkungan hanya dijadikan ajang negosiasi dan saling tekan antara Negara maju terhadap Negara berkembang. Seperti yang terjadi dalam KTT Bumi 1992, di mana kepentingan pembangunan tetap menjadi agenda utama, yang juga mendapat dukungan dari PBB dengan diadakannya Konferensi PBB dikenal juga sebagai Rio 2012 atau Rio+20 adalah sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh PBB sebagai bentuk dari tindak lanjut atas Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan atau KTT Bumi yang pernah diselenggarakan di kota yang sama 20 tahun yang lalu pada tahun 1992.⁶⁰ Hal yang senada juga terjadi dalam COP 13 di Bali pada tahun 2007, yang mengamini SE sebagai etika yang diakui dan dijalankan oleh berbagai pihak dalam mengelola lingkungan hidup. Dalam pertemuan yang menghasilkan Bali Road Map ini juga masih kental dengan nuansa tarik ulur kepentingan antara Negara maju dengan Negara berkembang. Pembahasan lebih pada seputar mekanisme jual beli karbon, termasuk di dalamnya tentang nilai dan angka yang tepat untuk transaksi.

⁶⁰ Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_PBB_tentang_Pembangunan_Berkelanjutan

Untuk melihat secara jelas konvensi perubahan iklim di Bali sebagai sebuah pertarungan etika lingkungan, ada beberapa prinsip dasar dari SE yang muncul dalam persidangan konvensi ini. *Pertama*, munculnya isu mengenai sumber daya alam yang secara jelas dinilai sebagai satu-satunya komponen dari bumi yang harus dimaksimalkan untuk kepentingan manusia. hal ini dikuatkan dengan tidak adanya pembatasan yang jelas terhadap industrialisasi sehingga tentunya membuka ruang bagi tindakan eksploitatif terhadap alam. Dan sebaliknya, DE menilai hal tersebut sebagai kesalahan besar yang seharusnya melihat alam sebagai sebuah kesatuan yang luas secara fungsi sehingga tidak dapat dilihat dalam satu fungsi yakni ekonomi. *Kedua*,

Di balik persoalan globalisasi dan pentingnya mengadakan Konferensi internasional tentang lingkungan, tersirat kepentingan MNC dari Negara maju. Baik lembaga-lembaga kreditor maupun lembaga internasional sebenarnya bekerja untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan bisnis Negara-negara maju, khususnya kepentingan ekonomi dan bisnis perusahaan multinasional.⁶¹

Dalam kaitan itu, sebenarnya berbagai perundingan, kesepakatan, dan perjanjian internasional yang dicapai dan berlaku hingga sekarang lebih merupakan agenda ekonomi dan bisnis MNC. Dalam hal ini kekuatan politik dan ekonomi Negara-negara maju dimanfaatkan secara sangat intens untuk dijadikan alat menekan Negara-negara sedang berkembang demi melindungi kepentingan ekonomi dan bisnis MNC tersebut.⁶²

⁶¹ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002), Hlm 239.

⁶² *Ibid.*

MNC yang menggelar operasinya di negara-negara berkembang seringkali juga bersikap tidak adil, apalagi dengan dukungan negara asalnya. Misalnya saja dalam aspek lingkungan, MNC memainkan standar ganda yang tentu sangat merugikan kepentingan lingkungan hidup. Saat beroperasi di negara berkembang, MNC dengan arogan seenaknya menerapkan standar lingkungan hidup yang liat, berbeda jauh dengan apa yang terjadi di negara maju yang notabene adalah negara asal dari MNC tersebut. Di mana standar lingkungan diberlakukan sangat ketat. Untuk urusan pengelolaan limbah misalnya, di Indonesia Newmont Minahasa Raya dan Newmont Nusa Tenggara bisa membuang limbah tambangnya yang berupa tailing ke laut.

Padahal, pembuangan limbah tailing ke laut telah lama ditentang di berbagai negara, karena tanpa diragukan lagi memiliki dampak jangka panjang terhadap ekologi pesisir dan mematikan organisme hidup di dasar laut, belum lagi terkait dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di sekitar wilayah dumping. Bahkan Pembuangan tailing ke laut ini telah dilarang di banyak negara melalui London Convention atau Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and Other Matters (1972). Namun sayangnya, Indonesia masih menjadi salah satu dari sedikit negara yang mempraktikkan pembuangan tailing ke laut ini. Saat ini praktik tersebut terjadi adalah di Minahasa dan di Sumbawa Barat, yang dua-duanya merupakan pertambangan Newmont, padahal negara asal Newmont, yaitu Amerika Serikat, termasuk negara yang telah lama melarang pembuangan tailing ke laut. Hal ini justru menunjukkan perspektif negara industri yang mengutamakan kepentingan

negaranya dan mengalihkan kerusakan lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam kepada negara berkembang, seperti Indonesia.⁶³

MNC memang adalah salah satu aktor berkuasa, bagaimana kita lihat MNC bisa mempengaruhi suatu negara untuk ke mana harus berjalan. Sesuatu yang ironis ketika negara asalnya melarang pembuangan limbah ke laut, namun dengan segala cara berusaha untuk bisa membuat MNC kebal terhadap berbagai tuntutan terkait dengan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan ketika perusahaan-perusahaan itu beroperasi di negara lain. Hal ini merupakan pola standar yang dimainkan oleh negara maju tersebut di tingkat global, bahkan dalam berbagai perundingan mengenai isu lingkungan hidup.

Dengan segala cara MNC melindungi kepentingan bisnis dan ekonominya. Termasuk dengan menggunakan negara sebagai alat dukungan. Hal tersebut tentu hanya bisa terjadi karena MNC mempunyai kekuatan besar yang harus dipertimbangkan. Ketika kepentingannya terganggu, MNC dengan mudah dan seenaknya mengorbankan lingkungan. Pada sisi lain, isu lingkungan hidup dijadikan alat proteksi bagi kepentingan ekonominya.

Dalam kaitan dengan kehadiran MNC di negara-negara berkembang, pemerintah negara berkembang menghadapi sebuah dilema yang pelik. Di satu sisi, mereka tidak boleh mentolerir kinerja lingkungan yang buruk dari perusahaan-perusahaan multinasional, di sisi lain isu investasi selalu dijadikan alat politik untuk menekan pemerintah negara sedang berkembang agar tidak mengganggu jalannya operasi MNC.

⁶³ Pius Ginting, "Petisi Pulihkan Teluk Senunu", diakses dari <http://www.walhi.or.id/id/mari-bergabung/petisi-online/1233-petisi-pulihkan-laut-teluk-senunu.html>

Isu investasi asing selalu dimainkan karena MNC dan negara maju sangat memahami bahwa modal adalah salah satu masalah besar negara berkembang. Negara berkembang sangat mengharapkan dan gencar menarik investasi asing ke negaranya demi pemulihan krisis ekonomi, peningkatan pembangunan ekonomi, dan khususnya demi penciptaan lapangan kerja. Untuk masalah yang terakhir ini, yaitu pengangguran, MNC sadar bahwa itu adalah isu yang sensitif dan berdimensi luas, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Ini dijadikan celah bagi MNC yang didukung oleh negara asalnya untuk menekan negara berkembang sebagai tuan rumah untuk mentolerir kinerja lingkungan MNC yang buruk, bila itu tidak terjadi, MNC siap henggang atau batal berinvestasi.

Dengan memanfaatkan kartu investasi, menunjukkan bahwa, pertama, agenda ekonomi selalu diprioritaskan sehingga agenda lingkungan hidup selalu diminta untuk apa boleh buat dikorbankan demi agenda ekonomi. Kedua, segala macam perundingan internasional untuk menyelamatkan lingkungan hanya basa basi dan akal-akalan politik, khususnya dari negara-negara maju. Mereka pun sadar bahwa selalu saja pemerintahnya akan memainkan berbagai cara demi memprioritaskan agenda ekonomi mereka dengan mengorbankan lingkungan hidup.⁶⁴

⁶⁴Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm 244.